

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penelitian tentang penyaluran dana ZIS, investasi asing langsung, inklusi keuangan syariah, dan tingkat pengangguran dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Analisis deskriptif variabel berdasarkan temuan penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Indonesia sepanjang 2019 hingga 2023 menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan ketimpangan yang masih mencolok antarprovinsi. Provinsi Papua secara konsisten mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 27,53% pada 2019 dan tetap tinggi di angka 26,03% pada 2023. Sementara itu, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah, yakni 3,47% pada 2019 dan 4,44% pada 2023. Sebelum pandemi, kemiskinan tinggi juga terlihat di wilayah timur seperti Maluku dan Gorontalo. Selama pandemi COVID-19 (2020–2021), sebagian besar provinsi mengalami kenaikan angka kemiskinan, meskipun Papua hanya menunjukkan sedikit penurunan, yang mengindikasikan ketahanan ekonomi yang lemah di wilayah tersebut. Pasca-pandemi, terdapat tren penurunan kemiskinan di sebagian besar provinsi, namun penurunan tersebut belum cukup signifikan di wilayah-wilayah dengan kemiskinan struktural, terutama di Indonesia bagian timur. Hal ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan yang lebih merata dan berkelanjutan untuk mengatasi disparitas kesejahteraan antarwilayah.

- b. Penyaluran Dana ZIS

Penyaluran ZIS di Indonesia dari 2019 hingga 2023 menunjukkan ketimpangan yang mencolok antarprovinsi. Jawa Barat mencatatkan penyaluran tertinggi, mencapai Rp 5,72 triliun pada 2023, sementara Papua menjadi yang terendah dengan hanya Rp14 miliar. Sebelum pandemi, nilai penyaluran cenderung stabil dan didominasi oleh provinsi dengan kapasitas

ekonomi besar. Selama pandemi (2020–2021), beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat mengalami peningkatan penyaluran sebagai bentuk solidaritas sosial. Peningkatan ini juga mencerminkan keberhasilan digitalisasi zakat dan penguatan lembaga di wilayah dengan basis muzaki besar. Sementara sebagian provinsi lainnya stagnan. Pasca pandemi (2022–2023), terjadi lonjakan signifikan di berbagai provinsi, terutama di Jawa, namun daerah timur seperti Papua dan Maluku masih menunjukkan angka penyaluran yang rendah. Hal ini menandakan perlunya penguatan kelembagaan zakat di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi namun penyaluran ZIS masih minim.

c. Investasi Asing Langsung

Investasi asing langsung di Indonesia periode 2019–2023 menunjukkan fluktuasi tajam akibat pandemi. Sebelum pandemi, Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi tujuan utama investasi asing langsung. Saat pandemi (2020–2021), terjadi penurunan di banyak wilayah, seperti Jawa Tengah. Namun, beberapa daerah seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara justru melonjak karena proyek strategis di sektor tambang. Pasca pandemi, investasi pulih di wilayah industri seperti Jawa Barat yang mencatatkan nilai tertinggi sebesar Rp 8.283,7 miliar pada 2023, diikuti oleh Maluku Utara Rp 4.998,2 miliar dan DKI Jakarta Rp 4.830 miliar. Sementara itu, Papua mencatat penurunan ekstrem menjadi hanya Rp8,3 miliar, terendah secara nasional. Hal ini menandakan, ketimpangan distribusi investasi asing langsung masih tinggi dan terkonsentrasi pada wilayah dengan basis ekonomi kuat, sehingga diperlukan strategi pembangunan yang lebih merata untuk meningkatkan daya tarik investasi di seluruh wilayah Indonesia.

d. Inklusi Keuangan Syariah

Indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia periode 2019–2023 menunjukkan kesenjangan yang signifikan antarprovinsi. DKI Jakarta mencatat indeks tertinggi, naik dari 0,57 (2019) menjadi 0,71 (2023), didorong oleh infrastruktur digital yang matang, penetrasi lembaga keuangan syariah, dan tingginya literasi keuangan masyarakat urban. Sementara itu, Maluku dan Papua tetap paling rendah di angka 0,01, mencerminkan

keterbatasan akses terhadap layanan keuangan syariah, minimnya lembaga keuangan, serta tantangan geografis dan sosial.

Sebelum pandemi, indeks nasional relatif rendah dan bertumbuh lambat. Selama pandemi (2020–2021), terjadi peningkatan di beberapa wilayah seperti Aceh (naik dari 0,30 ke 0,52) dan Papua (naik dari 0,01 ke 0,14), yang kemungkinan dipicu oleh digitalisasi layanan bantuan sosial serta dorongan transaksi daring. Namun, pasca pandemi, hanya beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Aceh, dan Kepulauan Riau (naik ke 0,32) yang mengalami peningkatan konsisten, sedangkan mayoritas stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan pascapandemi belum merata dan masih bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, peran pemerintah daerah, serta dukungan kebijakan literasi keuangan syariah yang kuat.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan data TPT provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2019–2023, terlihat bahwa TPT tertinggi secara konsisten tercatat di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, di mana DKI Jakarta mencapai 10,95%. Sebaliknya, provinsi dengan TPT terendah secara konsisten adalah Sulawesi Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Barat, dengan angka terendah tercatat di Sulawesi Barat sebesar 2,27% pada tahun 2023. Tren umum menunjukkan bahwa setelah lonjakan TPT pada tahun 2020–2021, sebagian besar provinsi mengalami penurunan TPT hingga 2023, mencerminkan proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, meskipun dengan kecepatan yang tidak merata antarwilayah.

2. Penyaluran dana ZIS memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023. Dengan demikian, semakin tinggi dana ZIS yang disalurkan, maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun.
3. Investasi asing langsung tidak menunjukkan pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023 karena distribusinya yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di provinsi-provinsi tertentu seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tengah. investasi asing langsung banyak masuk

ke sektor padat modal seperti industri pengolahan dan pertambangan, yang meskipun menghasilkan nilai ekonomi tinggi, tidak secara langsung menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dari kelompok miskin. Selain itu, sebagian besar provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi justru menerima investasi asing langsung dalam jumlah kecil dan tidak konsisten, sehingga dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di daerah-daerah tersebut menjadi terbatas.

4. Inklusi keuangan syariah tidak menunjukkan pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023 disebabkan oleh masih rendahnya skor indeks di sebagian besar provinsi, dengan banyak daerah berada dalam kategori sangat rendah ($\leq 0,3$). Hal ini mencerminkan bahwa ketersediaan, akses, dan pemanfaatan layanan keuangan syariah belum merata dan belum optimal digunakan oleh masyarakat miskin. Selain itu, meskipun beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Aceh, dan Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan signifikan, provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi justru mencatatkan nilai indeks yang stagnan dan rendah. Rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur layanan, serta belum kuatnya integrasi inklusi keuangan syariah dengan program penanggulangan kemiskinan menyebabkan dampaknya belum terasa signifikan terhadap penurunan kemiskinan selama periode tersebut.
5. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2019-2023. Maka, semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin tinggi juga tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode yang dianalisis.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur mengenai hubungan variable berbasis nilai-nilai Islam dan pengentasan kemiskinan. Secara khusus, penelitian ini menjadi salah satu yang mengkaji keterkaitan antara penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah), investasi asing langsung, inklusi keuangan syariah, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan dengan pendekatan data panel antarprovinsi di Indonesia. Sebagian besar studi terdahulu cenderung memisahkan pembahasan antara aspek keuangan

syariah dan aspek ekonomi makro, padahal keduanya memiliki keterkaitan erat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang ekonomi pembangunan dan keuangan Islam, khususnya dalam upaya mengintegrasikan sektor keuangan sosial Islam dengan instrumen ekonomi konvensional dalam pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap teori distribusi dan keadilan sosial dalam Islam, bahwa penyaluran dana ZIS secara optimal dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan, dengan menjembatani kesenjangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan konsep redistribusi kekayaan dalam Islam yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan menekan angka kemiskinan struktural.

Selanjutnya, temuan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan memperkuat teori ketenagakerjaan klasik, bahwa keterbatasan lapangan kerja akan berdampak pada penurunan pendapatan dan peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini juga mendukung temuan-temuan sebelumnya yang menekankan pentingnya pembangunan sektor padat karya untuk mengurangi pengangguran dan mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, inklusi keuangan syariah yang tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan memberikan kritik terhadap pendekatan *trickle-down effect* yang mengasumsikan bahwa investasi asing secara otomatis dapat menetes ke seluruh lapisan masyarakat. Temuan ini justru menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terarah agar manfaat investasi asing langsung dapat dinikmati oleh kelompok berpendapatan rendah melalui peningkatan keterampilan dan keterlibatan dalam sektor produktif.

Inklusi keuangan syariah yang juga tidak berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa meskipun sistem keuangan syariah memiliki potensi dalam menjangkau masyarakat rentan melalui prinsip keadilan dan kesetaraan, implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Hal ini membuka ruang bagi kajian teoritis lanjutan tentang peran strategi literasi keuangan syariah dan perluasan akses produk keuangan berbasis syariah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat miskin.

Dengan demikian, secara teoritis, penelitian ini menunjukkan pentingnya integrasi antara pendekatan pembangunan Islam dan strategi kebijakan yang tepat agar potensi ekonomi Islam dapat dioptimalkan dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam terkait efektivitas instrumen-instrumen ekonomi Islam dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan penghapusan kemiskinan.

5.2.2 Implikasi Praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini berimplikasi terhadap hal-hal berikut

1. Penyaluran dana ZIS yang optimal dan terarah, terutama dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi produktif, dapat menjadi solusi nyata dalam membantu masyarakat miskin keluar dari perangkap kemiskinan secara berkelanjutan.
2. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, diperlukan optimalisasi pendistribusian dana ZIS secara produktif, tidak hanya bersifat konsumtif. Pendayagunaan ZIS dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.
3. Pemerintah dan lembaga pengelola zakat perlu meningkatkan sinergi, transparansi, dan literasi masyarakat agar dana ZIS yang dihimpun benar-benar tersalurkan kepada mustahik secara efektif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi asing langsung belum berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih inklusif agar manfaat investasi asing langsung tidak hanya terpusat di sektor industri besar, tetapi juga menjangkau usaha kecil, padat karya, dan wilayah tertinggal.
5. Inklusi keuangan syariah yang masih rendah di sebagian besar provinsi menandakan perlunya perluasan infrastruktur, edukasi keuangan syariah, serta inovasi layanan berbasis digital agar masyarakat miskin memiliki akses nyata terhadap layanan keuangan syariah yang aman dan sesuai prinsip Islam.
6. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di sejumlah provinsi perlu direspons dengan kebijakan penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berbasis potensi lokal. Pemerintah perlu memperluas akses pelatihan vokasi serta mendorong

pertumbuhan sektor informal dan UMKM sebagai penyerap tenaga kerja utama.

7. Terkait data kemiskinan, perlu adanya peninjauan kembali terhadap standar ukuran kemiskinan nasional yang digunakan BPS. Ukuran garis kemiskinan versi BPS dinilai terlalu rendah jika dibandingkan dengan standar internasional seperti yang digunakan oleh World Bank, yang menetapkan batas kemiskinan ekstrem sebesar USD 2,15 per hari. Perbedaan ini dapat menyebabkan bias dalam pengukuran kemiskinan dan berpotensi menutupi kondisi kemiskinan riil yang lebih luas di masyarakat.

5.3 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat
 - a. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran bahwa zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) bukan hanya bentuk bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif demi peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.
 - b. Literasi keuangan syariah perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya mengenal produk keuangan syariah, tetapi juga mampu menggunakan layanan tersebut secara bijak dan berkelanjutan, terutama dalam memanfaatkan pembiayaan mikro dan simpanan berbasis syariah.
2. Bagi Pemerintah dan Regulator
 - a. Pemerintah pusat dan daerah disarankan untuk memperkuat sinergi program pengentasan kemiskinan dengan lembaga pengelola zakat. Penyaluran dana ZIS hendaknya tidak hanya diarahkan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi lebih difokuskan pada program-program produktif yang berorientasi pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
 - b. BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) disarankan untuk memperluas cakupan distribusi ZIS produktif di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, khususnya di wilayah luar Jawa, serta memastikan adanya pendampingan dalam pemanfaatannya untuk usaha produktif.
 - c. Otoritas terkait seperti BKPM dan Kementerian Investasi perlu meninjau kembali kebijakan penyaluran FDI agar diarahkan pada sektor-sektor yang

berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat miskin, bukan hanya pada sektor yang berorientasi ekspor atau padat modal.

- d. OJK dan Bank Indonesia didorong untuk memperluas akses inklusi keuangan syariah melalui digitalisasi layanan keuangan syariah dan peningkatan literasi di daerah tertinggal, serta mendorong kolaborasi antara perbankan syariah dan sektor UMKM.
 - e. Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah perlu menciptakan lebih banyak program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta memperluas dukungan terhadap sektor-sektor padat karya, guna menekan angka pengangguran terbuka dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - f. Badan Pusat Statistik (BPS) disarankan untuk meninjau kembali garis kemiskinan yang digunakan dalam pengukuran nasional, agar lebih mencerminkan kondisi riil masyarakat. Penyesuaian ukuran kemiskinan sebaiknya mempertimbangkan standar internasional seperti yang digunakan oleh World Bank, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode waktu analisis agar dapat menangkap tren jangka panjang dan dinamika struktural yang lebih jelas, terutama mengingat variabel seperti kemiskinan dan pembangunan manusia cenderung berubah secara gradual.
 - b. Sebaiknya penelitian di masa mendatang menambahkan variabel mediasi makroekonomi lainnya seperti tingkat pengangguran, investasi asing langsung inflasi, atau belanja sosial pemerintah, yang juga berperan penting dalam menjelaskan variasi kemiskinan antarprovinsi.
 - c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data zakat yang lebih komprehensif dengan memasukkan kontribusi dari lembaga amil zakat daerah, LAZ, maupun data potensi zakat nasional.